

BAB II

KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Studi Terdahulu

Penulis melihat bahwa *Korean Wave* sebagai media diplomasi publik yang digunakan oleh Korea Selatan, sehingga penulis akan menganalisa lebih dalam lagi bagaimana Korea Selatan memanfaatkan kesuksesan budaya populer tersebut sebagai media diplomasi publik dalam membangun *image* positif sebuah negara. Studi terdahulu di bawah ini untuk mencari informasi mengenai penggunaan diplomasi publik di berbagai negara. Dalam upaya menganalisa poin pertanyaan dalam skripsi ini, penulis mencoba untuk merujuk kepada beberapa penelitian terkait. Dengan adanya beberapa rujukan, kiranya memberikan kontribusi baru baik untuk melengkapi penelitian yang telah diketahui atau diteliti sebelumnya, dan juga sebagai referensi bagi penulis.

Studi terdahulu pertama adalah pada paper karya Mukhtasar Syamsuddin yang berjudul *Hallyu And Indonesia; Hallyu Status in Indonesia and Its Impact*. Dalam tulisannya Syamsuddin membahas mengenai potensi budaya populer Korea Selatan yang mampu memberikan keuntungan ekonomi yang mampu mengangkat negara tersebut dari kemiskinan pada tahun 1950an.²⁴ Kemudian Syamsuddin juga menjelaskan bagaimana Korea Selatan memulai kerjasama dalam bidang ekonomi hingga ke ranah budaya dengan Indonesia di berbagai

²⁴ Mukhtasar Syamsuddin. 2012. *Hallyu and Indonesia (Hallyu Satus in Indonesia and its impac)*. (Jakarta: Seminar on Cultural Cooperation & *Korean Wave*) Hal. 1

macam sektor dimana salah satunya adalah sektor budaya.²⁵ Dalam sektor budaya, *Korean Wave* menjadi agenda penting Korea Selatan yang tengah mendapatkan perhatian dan antusiasme masyarakat Indonesia sejak dari pertama kemunculannya di layar kaca.

Syamsuddin menjelaskan linikala invasi budaya populer Korea Selatan dalam bentuk drama Korea, film, dan K-Pop yang mampu membuat jutaan orang tergila-gila.²⁶ Diterimanya budaya Korea ini juga tidak lepas dari budaya itu sendiri yang mempunyai nilai konfusius yang juga sama-sama terdapat pada Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.²⁷ Selain itu juga, drama-drama atau film Korea pada dasarnya menampilkan kisah atau cerita tentang cinta dimana konten ini adalah salah satu konten yang paling diminati masyarakat Indonesia.²⁸ Di akhir tulisannya, Syamsuddin juga memaparkan prospek *Korean Wave* dimana untuk mencapai kesuksesan jangka panjang, diperlukan kerjasama bilateral yang lebih kuat lagi antara Korea Selatan dengan Indonesia.²⁹ Penguatan hubungan bilateral ini bertujuan agar masyarakat Indonesia semakin familiar dengan budaya dan bahasa Korea sehingga timbul ketertarikan yang lebih mendalam terhadap konten budaya populer dari Korea Selatan.

Studi terdahulu kedua yang juga mendukung penelitian penulis adalah pada paper Tonny Dian Effendi yang berjudul *Diplomasi Publik dan Kerjasama Indonesia-Malaysia*. Tulisan ini membahas peran diplomasi publik dan kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan Malaysia yang dapat digunakan

²⁵ Ibid hal. 3

²⁶ Ibid Hal. 4-5

²⁷ Ibid Hal. 6

²⁸ Ibid Hal. 7

²⁹ Ibid Hal. 9

sebagai salah satu alat untuk mengatasi perselisihan masyarakat di kedua negara yang diakibatkan oleh persepsi negatif.³⁰ Tulisan ini menggunakan konsep tiga dimensi diplomasi publik Mark Leonard. Dengan kata lain, dalam pelaksanaan diplomasi publik ini melewati beberapa tahapan dan masing-masing tahapan ini memiliki aktifitas yang berbeda-beda.³¹ Bisa dikatakan bahwa diplomasi publik mencakup aspek yang luas atau kompleks dalam pencapaiannya.

Tahapan pertama adalah memperkenalkan negara tersebut bagi publik negara lain, kedua menciptakan persepsi yang positif, dan yang ketiga adalah mengundang masyarakat dari luar negeri untuk datang berkunjung baik untuk belajar, pariwisata, membeli produk dan mampu memahami budaya dan nilai yang ada. Paper ini juga menjelaskan operasionalisasi dari tahapan di atas yang dilakukan oleh kedua pemerintah baik Malaysia maupun Indonesia.³² Ketiga tahapan ini dalam penjelasannya mempunyai peran yang sama pentingnya dalam proses diplomasi publik. Terdapat pula jalur yang dapat digunakan pemerintah dalam mengimplementasikan diplomasi publik. Yakni melalui jalur pendidikan dan budaya, ekonomi dan perdagangan, serta teknologi dan informasi.³³ Selain itu paper ini juga berisi tentang kerjasama yang dibangun dan disetujui oleh kedua negara untuk memperkuat hubungan kedua negara tersebut serta menghapus persepsi negatif dan membangun persepsi baru yang positif dan kuat.

Di akhir tulisan, dijelaskan pula bahwa pemerintah tidak dapat berjalan sendiri dalam diplomasi publik. Pemerintah dapat mengundang berbagai aktor

³⁰ Tonny Dian Effendi. *Diplomasi Publik Sebagai Pendukung Hubungan Indonesia-Malaysia*. Universitas Muhammadiyah Malang. Hal. 48

³¹ Ibid Hal. 53

³² Ibid

³³ Ibid Hal. 56

yang dapat terlibat seperti masyarakat, akademisi, professional, pebisnis, komunitas keagamaan, artis dan lain-lain untuk bekerja bersama membangun citra positif suatu negara.³⁴

Relevansi studi terdahulu tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis yakni pada beberapa terdahulu yang pertama, sama-sama membahas tentang fenomena atau isu popularitas *Korean Wave* di Indonesia. Yang membedakan adalah pada penelitian ini penulis akan menjelaskan bagaimana kerjasama Korea Selatan dengan Indonesia dalam mempopulerkan *Korean Wave* sebagai perpanjangan dari kepentingan negar. Disini penulis menggunakan konsep kerjasama internasional milik K.J. Holsti untuk menganalisa kerjasama bilateral Korea Selatan Ke Indonesia melalui budaya populer *Korean Wave*.

Kemudian studi terdahulu yang kedua milik Tonny Dian Effendi menjelaskan tentang penggunaan diplomasi publik oleh pemerintah Malaysia dan Indonesia serta kerjasama bilateral untuk menghapuskan citra positif antara dua negara tersebut. Disini penulis menggunakan konsep kerjasama Internasional seperti halnya Effendi, namun perbedaannya adaah penelitian penulis memfokuskan penelitian ini pada negara Korea Selatan dan Indonesia terkait dengan kerjasama (bilateral) Korea Selatan ke Indonesia dalam mempopulerkan budaya populer *Korean Wave* khususnya pada tahun 2006 dimana tahun ini adalah tahun monumental dan tahun dimana Indonesia menjadi salah satu negara penikmat konten dan konsumsen masif dari budaya populer Korea Selatan di wilayah Asia Tenggara.

³⁴ Ibid Hal. 60

2.2 Kerangka Konsep

2.2.1 Konsep Kerjasama Internasional

Menurut Kalevi J. Holsti, pada dasarnya semua negara di dunia ini tidak dapat berdiri sendiri. Negara perlu bekerjasama dengan negara yang lainnya karena adanya saling ketergantungan sesuai dengan kebutuhan negara masing-masing. Kerjasama dapat mencakup dalam bidang ekonomi, politik, pendidikan, budaya, keamanan dan dijalin oleh suatu negara dengan satu atau lebih negara lainnya. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama sesuai dengan kepentingan negara tersebut. Kerjasama antar negara juga dapat mempercepat proses peningkatan kesejahteraan dan penyelesaian masalah diantara dua atau lebih negara tersebut. proses kerjasama atau kolaborasi terbentuk dari perpaduan keanekaragaman masalah nasional, regional, atau global yang muncul dan memerlukan perhatian dari lebih satu negara. Masing-masing pemerintah saling melakukan pendekatan yang membawa usul penanggulangan masalah, mengumpulkan bukti-bukti tertulis untuk membenarkan suatu usul atau yang lainnya dan mengakhiri perundingan dengan suatu perjanjian atau pengertian yang memuaskan semua pihak.³⁵

Holsti juga menggolongkan definisi kerjasama internasional sebagai berikut :

³⁵ K.J Holsti, Politik Internasional, Kerangka Untuk Analisis , Jilid II, Terjemahan M. Tahrir Azhari. Jakarta: Erlangga, 1988, hal. 652-653 diakses pada 11 Januari 2018

- a. Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus.
- b. Pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya akan membantu negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya.
- c. Persetujuan atau masalahmasalah tertentu antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan kepentingan.
- d. Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi di masa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan.
- e. Transaksi antar negara untuk memenuhi persetujuan mereka.³⁶

Kerjasama pula juga dapat terdiri dari beberapa bentuk yakni kerjasama multilateral dan kerjasama bilateral. Pada tulisan ini, hubungan bilateral adalah yang dirasa penulis dapat menjelaskan tulisan ini dikarenakan aktor yang terlibat dalam kasus ini adalah dua negara saja. Hubungan bilateral adalah keadaan yang menggambarkan adanya hubungan yang saling mempengaruhi atau terjadi hubungan timbal balik antara dua pihak atau dua negara.³⁷

Terselanggaranya hubungan bilateral juga tidak terlepas dari tercapainya beberapa kesepakatan antara dua negara yang melakukan hubungan yang mana mereka mengabdikan pada kepentingan nasionalnya

³⁶ Ibid

³⁷ Krisna, Didi. 1993. Kamus Politik Internasional, Jakarta : Grasindo, hal. 18 diakses pada 11 januari 2018

dalam usaha untuk menyelenggarakan politik luar negerinya masing-masing. Dengan tujuan nasional yang ingin dicapai suatu bangsa dapat terlihat dari kepentingan nasional yang dirumuskan oleh elit suatu bangsa. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Plano dan Olton bahwa:

Hubungan kerjasama yang terjadi antara dua negara didunia ini pada dasarnya tidak terlepas dari kepentingan nasional masing-masing negara. Kepentingan nasional merupakan unsur yang sangat vital yang mencakup kelangsungan hidup bangsa dan negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan, militer, dan kesejahteraan ekonomi.³⁸

Selanjutnya, dalam hubungan internasional, hubungan bilateral selalu berada dalam dua konteks, yaitu kerjasama dan konflik. Kedua konteks hubungan internasional ini berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan dinamika hubungan internasional itu sendiri. Pola interaksi hubungan bilateral dalam konteks kerjasama diidentifikasi dengan bentuk kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral dapat pula di artikan dengan adanya kepentingan yang mendasari kesepakatan antara dua negara untuk berinteraksi dalam suatu bidang tertentu.³⁹

Menurut kerangka pemahaman Holsti, terbentuknya suatu kerjasama berdasarkan pada: Kedua belah pihak pemerintah saling mendekati untuk membahas suatu masalah atau kejadian, mengemukakan bukti-bukti teknis untuk menyetujui satu penyelesaian atau lainnya, dan mengakhiri perundingan dengan perjanjian atau

³⁸ <http://thesis.umy.ac.id/datapublik/t25496.pdf> diakses pada 11 Januari 2018

³⁹ Krisna, Didi. 1993. Kamus Politik Internasional, Jakarta : Grasindo, hal. 18 diakses pada 11 januari 2018

pengertian tertentu yang memuaskan kedua belah pihak. Proses inilah yang disebut Holsti sebagai kerjasama.⁴⁰

Holsti juga memberikan pemahaman tambahan mengenai batasan konsepsi yang jelas antara dua bentuk interaksi dalam hubungan internasional, yaitu konflik dan kerjasama. Apabila dalam menghadapi satu kasus atau lebih pihak-pihak yang terlibat gagal mencapai kesepakatan, maka interaksi antar aktor tersebut akan berujung pada konflik. Namun apabila pihak yang terlibat berhasil mencapai suatu kesepakatan bersama, maka interaksi antar aktor tersebut akan menghasilkan suatu bentuk kerjasama.⁴¹

Dalam membentuk sebuah kerjasama bilateral setiap negara memiliki tujuannya masing-masing, oleh karena itu setiap negara merumuskan sebuah kebijakan yang menyangkut dengan kepentingan negara tersebut.⁴² Pada kasus ini, Korea Selatan mempunyai kepentingan nasionalnya yang tertuang dalam *Diplomatic White Paper* yang dipelihara dan diamandemen setiap tahunnya untuk menjamin kelestarian kepentingan tersebut dari waktu ke waktu secara tegas dan konsisten. Sebab atas dasar kepentingan nasional tersebut, sebuah negara akan merumuskan sebuah kebijakan. Kebijakan luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain atau

⁴⁰ K.J Holsti, *Politik Internasional, Kerangka Untuk Analisis*, Jilid II, Terjemahan M. Tahrir Azhari. Jakarta: Erlangga, 1988, hal. 209 diakses pada 11 Januari 2018

⁴¹ Ibid

⁴² Ibid

unit politik internasional lainnya yang dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang di tuangkan dalam kepentingan nasional.

Dalam melakukan kerjasama internasional, sekurang-kurangnya harus memiliki dua syarat utama, yaitu:

1. Adanya keharusan untuk menghargai kepentingan nasional masing-masing anggota yang terlibat, tanpa adanya penghargaan, tidak mungkin dapat dicapai suatu kerjasama seperti yang diharapkan semula.
2. Adanya keputusan bersama dalam mengatasi persoalan yang timbul. Untuk mencapai keputusan bersama diperlukan komunikasi dan konsultasi secara berkesinambungan, bahkan komunikasi dan konsultasi lebih penting dibandingkan dengan komitmen yang biasanya hanya dilakukan sewaktu-waktu saja. Dengan kata lain frekuensi komunikasi dan konsultasi harus lebih tinggi dari komitmen.⁴³

Dalam kerjasama bilateral, letak geografis kedua negara yang saling berjauhan tidak lagi menjadi hambatan. Perkembangan yang menakjubkan telah memungkinkan semua itu. Semakin tingginya saling ketergantungan antara negara satu dengan yang lain telah menjadikan letak geografis yang berjauhan tidak lagi menjadi penghalang yang berarti. Hubungan antar dua negara bisa dilakukan dalam berbagai bidang kehidupan manusia seperti; bidang ekonomi, politik, militer dan

⁴³ Dam, Syamsur. *Kerjasama ASEAN, Latar Belakang, Perkembangan Dan Masa Depan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1996, hal 15 Diakses pada 11 Januari 2018

kebudayaan. Hubungan akan terjalin sesuai dengan tujuan-tujuan spesifik serta bidang-bidang khusus yang dijadikan tolak ukur bagi suatu negara dalam melakukan hubungan dengan negara lain. Dalam hubungan tersebut sangat ditentukan oleh hasil interaksi kedua negara dalam berbagai bidang. Selain itu, dijelaskan pula bahwa dua negara yang menjalin kerjasama bilateral ini tentu pula mengharapkan keuntungan. Suatu kerjasama akan melahirkan kesepakatan bersama berupa ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi bersama bagi terjadinya harmonisasi hubungan diantara keduanya. Tentunya kesepakatan-kesepakatan yang telah dilahirkan merupakan kebijakan yang akan memberi keuntungan bagi kedua negara yang bekerjasama sesuai dengan tujuan dari masing-masing negara yang hendak dicapainya sesuai yang tercermin dari kepentingan nasional negara tersebut.⁴⁴

Selain itu, penulis juga menambahkan tulisan Joseph Nye untuk memperkuat substansi dalam tulisan atau kasus ini. Tulisan Nye dalam jurnal *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science* karya dari Joseph S. Nye, Jr berjudul *Public diplomacy and Soft Power* yang menjelaskan tentang apakah yang dimaksud dengan *soft power*. *Soft power* adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan dan menguntungkan kita tanpa meminta ataupun baik paksaan, ancaman, kekuatan militer dan

⁴⁴ <http://id.svoong.com/social-sciences/political-science/2232277-konsep-hubungan-bilateral/#ixzz25Y091CGr>. Diakses pada 11 Januari 2018

ekonomi.⁴⁵ Nye menjelaskan bahwa *soft power* suatu negara terletak terutama pada tiga sumber yakni budaya, nilai-nilai politik, dan kebijakan luar negeri.⁴⁶ Nye juga menjelaskan bahwa didalam diplomasi publik suatu negara, hal tersebut bisa dijadikan upaya dalam menarik perhatian orang lain dengan memanfaatkan sumber daya atau potensi yang ada dengan cara penyiaran, ekspor budaya, serta melakukan agenda pertukaran, dan sebagainya.⁴⁷ Tulisan ini menegaskan bahwa budaya sebagai senjata atau instrumen yang potensial untuk meningkatkan soft power suatu negara.

2.3 Operasionalisasi Konsep

Penggunaan budaya populer sebagai instrumen untuk memproyeksikan kepentingan negara sangatlah efektif. Ini dikarenakan budaya populer seperti *Korean Wave* dianggap mudah untuk diterima masyarakat dengan luasnya segmentasi seperti latar belakang maupun gender dan penyebarannya pun juga dapat dilakukan dengan sejumlah cara berikut dengan banyak aktor yang dapat berperan. Ditambah lagi pada umumnya acara hiburan memiliki profil yang tinggi, serta menjadi pusat perhatian dari penggemar atau *fans* di berbagai penjuru dunia tidak terkecuali *Korean Wave* yang telah terbukti menjadi konsumsi publik dalam skala global tak terkecuali di Indonesia. Ini merupakan keunikan dan kelebihan tersendiri yang dimiliki oleh sektor hiburan apalagi jika merupakan

⁴⁵ Joseph S. Nye, Jr. 2008. *Public Diplomacy and Soft Power*. The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science. Hal. 94-95

⁴⁶ Ibid Hal. 96

⁴⁷ Joseph S. Nye, Jr. 2008. *Public Diplomacy and Soft Power*. The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science. Hal. 95

senjata diplomasi publik suatu negara maka akan menjadi sebuah senjata yang ampuh terlebih di era modernisasi seperti sekarang.

Pada penelitian ini penulis berfokus dalam menjelaskan kerjasama pemerintah Korea Selatan dengan pemerintah Indonesia dalam menyebarkan *Korean Wave* dengan menggunakan konsep kerjasama yang seperti dikemukakan oleh Holsti.

Menurut Holsti, suatu negara dianggap bekerjasama dengan negara lain jika terdapat indikator sebagai berikut.

1. Kedua pihak saling mendekati untuk membahas suatu masalah atau fenomena atau kejadian.
2. Kedua pihak mengemukakan bukti-bukti teknis untuk menyetujui satu penyelesaian atau dalam kasus ini, kesepakatan.
3. Kedua pihak mengakhiri dengan mengakhiri perundingan atau perjanjian.

Pada indikator pertama, yakni dimana kedua pihak saling mendekat untuk membahas suatu masalah atau fenomena atau kejadian, penulis akan melihat serta menjabarkan momentum dimana pemerintah Korea Selatan dan pemerintah Indonesia saling mendekat dan membicarakan suatu fenomena atau kejadian yang signifikan terjadi. Dalam penelitian ini, penulis merepresentasikan fenomena tersebut dengan demam *Korean Wave* yang terjadi di Indonesia. Masyarakat Indonesia benar-benar merespon *Korean Wave* dengan sangat luar biasa hingga tercatat paling tinggi di Asia Tenggara. Momen ini direspon balik oleh pemerintah Korea Selatan mengingat tingginya antusiasme seperti salah satunya dengan

dibukanya kantor Korea Creative Content Agency (KOCCA) oleh pemerintah Korea di Indonesia dan merupakan yang pertama di Asia Tenggara.⁴⁸ Ini merupakan respon nyata dan sikap serius yang dikeluarkan oleh pemerintah Korea Selatan dalam menangani ledakan *Korean Wave* di Indonesia yang mana selanjutnya pemerintah kedua negara tersebut dapat menciptakan kerjasama dalam bidang budaya.

Pada indikator kedua, yakni dimana kedua pihak mengemukakan bukti-bukti teknis untuk menyetujui satu penyelesaian atau dalam kasus ini, kesepakatan, penulis akan menjelaskan adanya proses tersebut dan menjabarkan bahwa pihak Korea Selatan dan pihak Indonesia benar-benar saling bertemu atau berkomunikasi satu sama lain guna membicarakan bukti-bukti teknis, dalam penelitian ini adalah *Korean Wave* yang pada akhirnya dipakai untuk merumuskan suatu kesepakatan. Menurut Holsti, suatu kesepakatan kerjasama antar negara baik bilateral maupun multilateral, kedua belah pihak atau pihak-pihak terkait akan membicarakan bukti-bukti teknis yang pada akhirnya berkontribusi sebagai acuan untuk membuat kesepakatan yang dapat meng-cover keinginan pihak terkait.⁴⁹ Dalam hal ini, penulis akan mengemukakan bahwa pihak Korea Selatan dan Indonesia berkomunikasi dalam membicarakan bukti-bukti yang terkait dan relevan mengenai ledakan *Korean Wave* di Indonesia dimana dengan adanya kejadian ini, kedua negara ini akan menciptakan suatu kerjasama.

⁴⁸ Sim Younhee. *Behind The Korean Wave*. <http://globeasia.com/columnists/behind-the-korean-wave/> diakses pada 5 Desember 2017

⁴⁹ K.J Holsti, *Politik Internasional, Kerangka Untuk Analisis*, Jilid II, Terjemahan M. Tahrir Azhari. Jakarta: Erlangga, 1988, hal. 652-653 diakses pada 11 Januari 2018

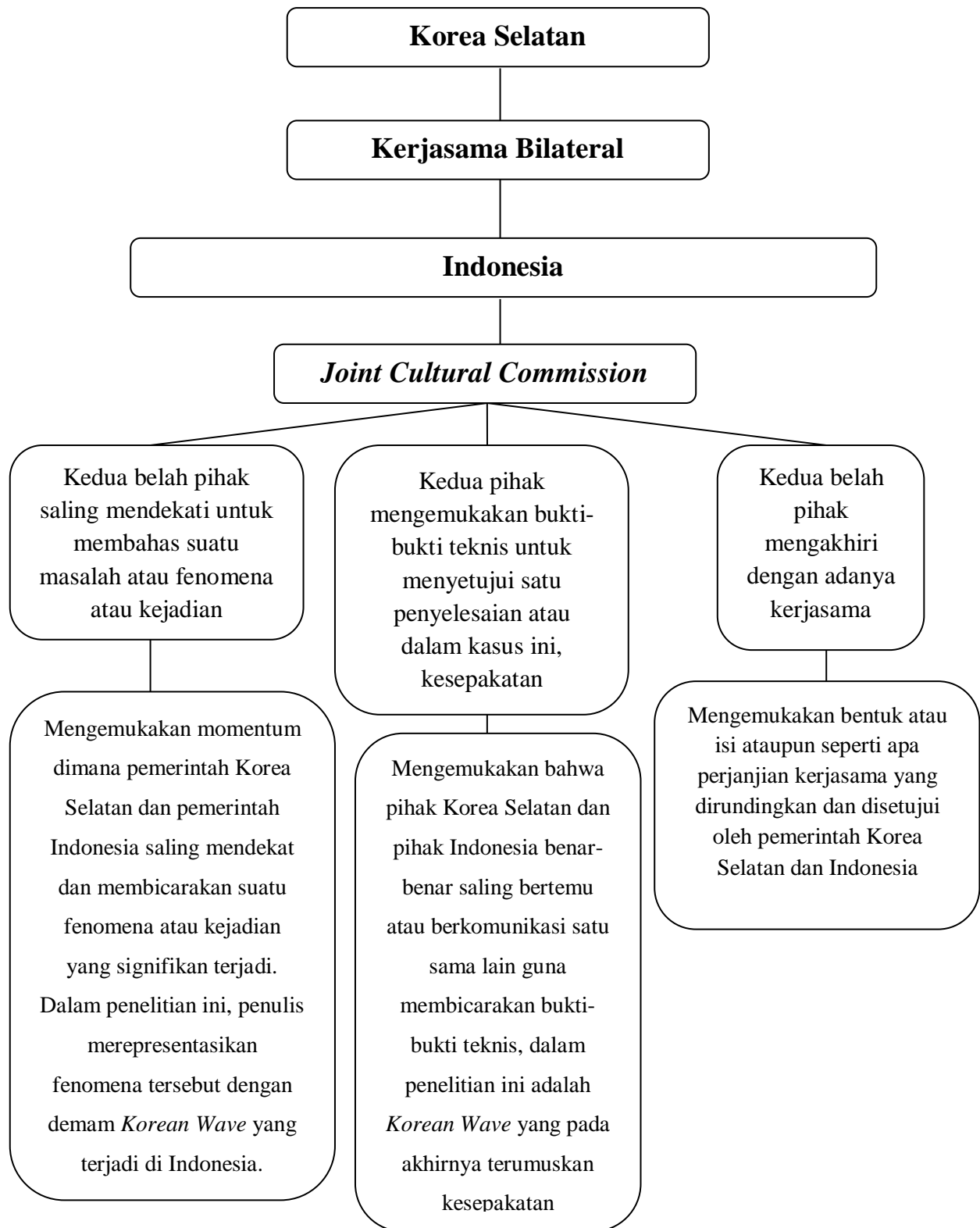
Terakhir, dalam indikator ketiga dimana kedua pihak yakni Korea Selatan dan Indonesia mengakhiri dengan sebuah perundingan atau perjanjian untuk bekerjasama. Suatu hal yang dinamakan kerjasama, haruslah ada perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak sebagai pedoman untuk bekerjasama setelahnya dan seterusnya. Kesepakatan yang lahir ini dapat sangat menegaskan adanya suatu kerjasama yang telah digagas oleh suatu negara dengan negara lain untuk memproyeksikan kepentingan negara mereka. Dalam hal ini, penulis akan mengemukakan bentuk atau isi ataupun seperti apa perjanjian kerjasama yang dirundingkan dan disetujui oleh pemerintah Korea Selatan dan Indonesia khususnya yang bersinggungan dengan budaya seperti *Korean Wave*.

Konsep	Indikator	Operasionalisasi
Kerjasama Bilateral (Holsti)	1. Kedua belah pihak saling mendekati untuk membahas suatu masalah atau fenomena atau kejadian	1. Mengemukakan momentum dimana pemerintah dari dua negara saling mendekat dan membicarakan suatu fenomena atau kejadian yang signifikan terjadi.
	2. Kedua pihak mengemukakan bukti-bukti teknis untuk menyetujui satu penyelesaian atau dalam kasus ini,	2. Mengemukakan bahwa kedua belah pihak terkait benar-benar saling bertemu atau berkomunikasi satu sama lain

	kesepakatan.	guna membicarakan bukti-bukti teknis yang pada akhirnya dipakai untuk merumuskan suatu bentuk kesepakatan.
	3. Kedua belah pihak mengakhiri dengan perundingan atau perjanjian kerjasama.	3. Mengemukakan bentuk atau isi ataupun seperti apa perjanjian kerjasama yang dirundingkan dan disetujui oleh pemerintah kedua belah negara yang terkait.

Penulis akan mengemukakan dan membuktikan bahwa pemerintah Korea Selatan dan pemerintah Indonesia benar-benar merumuskan suatu bentuk kerjasama budaya melalui *Korean Wave* sesuai dengan kepentingan atau proyeksi negara tersebut untuk menyuntikkan seluruh *image* positif maupun nilai-nilai tentang budaya populer Korea Selatan beserta seluruh potensinya kepada masyarakat Indonesia seluas mungkin.

2.4 Alur Pemikiran



2.5 Argumen Utama

Berdasarkan rumusan konseptual diatas, maka argumen utama yang diajukan oleh penulis adalah: Kerjasama Korea Selatan Selatan melalui *Joint Cultural Commission* ke Indonesia pada tahun 2006 menggunakan konsep kerjasama bilateral dengan tiga indikator yakni: 1). Kedua pihak saling mendekati untuk membahas suatu masalah atau fenomena atau kejadian. 2). Kedua pihak mengemukakan bukti-bukti teknis untuk menyetujui satu penyelesaian atau dalam kasus ini, kesepakatan. 3). Kedua pihak mengakhiri dengan mengakhiri perundingan atau perjanjian.